

BAB II

RESTORASI MEIJI ATAU MODERNISASI JEPANG

2.1 Runtuhnya Pemerintahan Tokugawa

Berbicara mengenai Tokogawa, maka sangat erat kaitannya dengan zaman Edo. Zaman Edo (1603-1867) adalah zaman dimana Jepang diperintah oleh keluarga Tokugawa. Disebut zaman Edo karena pemerintahan keshogunan Tokugawa waktu itu berpusat di kota Edo (Tokyo). Zaman Edo atau sering juga disebut masa Tokugawa adalah zaman yang sangat berpengaruh bagi Jepang modern, bukan hanya karena zaman ini adalah satu masa sebelum Restorasi Meiji yang menjadi gerbang modernisasi di Jepang tetapi karena pada masa ini unsur-unsur budaya Jepang berkembang dengan pesat. Berbagai kemajuan Jepang dicapai pada masa ini, mulai dari lahirnya berbagai bentuk kesenian sampai sistem perekonomian yang maju, masyarakatnya pun tidak hanya mengalami kemajuan tetapi juga menjadi landasan terbentuknya masyarakat Jepang modern.

Shinzaburo (dalam Situmorang, 1995 :41), membagi periode pemerintahan Tokugawa berdasarkan kemantapannya atas tiga periode :

1. Periode pertama tahun 1603-1632

Periode pertama adalah masa shogun Ieyashu (1603-1605) sampai pada masa shogun Hidetada (1605-1632). Pada periode ini berkembang aliran Konfusianis yang bertujuan demi kepentingan politik.

2. Periode kedua tahun 1633-1854

Periode kedua adalah masa kemantapan keshogunan Tokugawa, yang diperintah oleh sepuluh generasi Tokugawa, dari Iemitsu (1633-1651) sampai shogun Ieyoshi (1837-1853)

3. Periode ketiga tahun 1855-1867

Periode ketiga adalah masa kehancuran keshogunan Tokugawa hingga menyerahkan kekuasaan kepada kekaisaran (1853-1867) diperintah oleh tiga generasi Tokugawa yaitu Shogun Iesada, Iemochi dan Yoshinobu.

Pemerintah Tokugawa mengalami masa kejayaan yang panjang tetapi pada abad ke-19, kekuasaan Tokugawa mulai mengalami kemunduran. Kaum samurai makin mengalami kesulitan keuangan dan hutang yang terus meningkat. Di kota-kota mulai terjadi ketegangan-ketegangan antara pedagang kaya dengan rakyat miskin, di desa-desa mulai ada perbedaan antara yang memiliki tanah dan yang tidak memiliki tanah (Suryohadiprojo,1982:21).

Selain penyebab diatas, faktor lain yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan Tokugawa adalah berikut ini

a.Kaikoku (Pembukaan Negara)

Selama kurang lebih 250 tahun Jepang menutup diri dari pengaruh luar. Jepang tidak menyadari adanya kemajuan-kemajuan yang diperoleh bangsa barat, terutama dalam bidang industri. Perkembangan kapitalisme mengakibatkan revolusi industri, sehingga bangsa barat melihat luar negeri untuk mencari daerah pemasaran bagi hasil industrinya dan mencari sumber bahan baku yang baru. Menjelang akhir abad ke-17 bangsa barat mendesak untuk mengadakan hubungan

dagang dengan Cina dan Jepang. Bangsa barat yang pertama datang ke Jepang adalah Rusia (Nurhayati,1987:33)

Pada tahun 1853 Amerika mengirimkan utusan yang dipimpin oleh Commodore Matthew.C. Perry yang masuk ke Jepang melalui teluk Edo. Menurut Nurhayati (1987 ;35), Perry membawa surat resmi dari presiden Amerika Serikat yang menyatakan ingin mengadakan hubungan dagang dengan Jepang dan juga dijelaskan bahwa kedatangan Perry adalah untuk meminta :

1. Perlindungan bagi pelaut Amerika yang mengalami kecelakaan di laut.
2. Pembukaan kota-kota pelabuhan bagi kapal-kapal Amerika untuk melakukan perbaikan kapal dan menambah perbekalan.
3. Pembukaan kota-kota pelabuhan untuk perniagaan.

Setelah surat itu disampaikan, pemerintahan bakufu meminta waktu satu tahun untuk mempertimbangkan hal tersebut. Setahun kemudian Perry kembali lagi ke Jepang dengan membawa armada perangnya untuk memaksa Jepang agar mau membuka hubungan dengan Amerika. Perry tidak segan-segan mengancam dengan kekerasan. Rakyat Jepang menolak kedatangan bangsa asing dan mereka menyerukan slogan yang dikenal dengan *Sonno Joi* yang berarti hormati Tenno dan usir kaum biadab (maksudnya orang-orang asing). Mereka menunjukkan sikap yang anti terhadap bangsa asing. Di beberapa wilayah rakyat Jepang mengadakan kekacauan-kekacauan untuk mengusir bangsa Barat (Nurhayati,1987:45).

Pada tanggal 31 Maret 1854 pemerintah Tokugawa akhirnya menandatangani perjanjian dengan Amerika di Kanagawa yakni sebuah kampung

nelayan di Yokohama, lalu Amerika menempatkan Konsul Jendral yang bernama Townsend Harris di Yokohama. Dengan demikian akhirnya Jepang dibuka setelah pengasingan yang berlangsung sepanjang 250 tahun dan tidak lagi merupakan sebuah negara terpencil dari masyarakat dunia (Nurhayati,1987:33).

b. Pemberontakan dalam Negeri

Sejak terjadinya pembukaan negara, pemberontakan dalam negeri semakin meningkat karena rakyat Jepang tidak menginginkan perjanjian tersebut ditandatangani oleh pemerintahan Tokugawa, terutama pihak kekaisaran karena perjanjian itu belum memperoleh izin dari kaisar. Penandatanganan perjanjian ini menimbulkan kekesalan dan gerakan anti pemerintahan bakufu yang diwakili oleh daimyo Tozama. Hal-hal yang mereka tentang antara lain adalah menentang adanya hubungan dagang dengan orang asing, menginginkan pengembalian fungsi politik kepada kaisar, dan ingin menegakkan kembali pemujaan terhadap Tenno dan agama Shinto serta kembali pada Shintoisme yang murni sebagai reaksi dari Ryobu Shinto dan Budhisme (Nurhayati,1987:45).

Perjanjian dengan negara Barat juga membawa dampak dimana perdagangan berkembang pesat. Golongan petani merupakan produsen yang sangat membantu kehidupan golongan lain. Tetapi mereka sangat menderita karena diwajibkan membayar pajak yang sangat tinggi dengan sebagian hasil panen mereka. Ada semboyan yang berbunyi “kepada petani jangan diberi kehidupan maupun kematian” artinya bahwa setiap petani harus ditempatkan sebagai kelas masyarakat yang hanya wajib memproduksi dan membayar pajak.

Akibatnya kehidupan petani semakin sulit dan akhirnya banyak yang meninggalkan lahan pertaniannya dan menjadi buruh tani di tanah pertanian orang lain. Mereka juga mulai membentuk kelompok-kelompok untuk membela haknya dengan kekerasan, memberontak, dan melawan pemerintah (Nurhayati,1987:19). Pemberontakan petani yang tidak puas terhadap pemerintah semakin hari semakin mengacaukan keadaan Jepang saat itu. Disamping bencana alam dan bahaya kelaparan yang sering terjadi pada pemerintahan Tokugawa menambah semangat rakyat untuk meruntuhkan kedudukan shogun.

Akibat dari penandatanganan perjanjian tersebut, pemerintah Tokugawa tidak lagi memperoleh kepercayaan dari rakyat untuk melindungi mereka dari pengaruh luar dan tidak dapat memberikan perlindungan terhadap rakyatnya.

Alasan ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang ingin menggulingkan kekuasaan Tokugawa. Setelah terjadi beberapa peristiwa buruk, maka pada tahun 1867 pemerintah Tokugawa menyerahkan kekuasaan pada kaisar Meiji. Dengan demikian pemerintahan Tokugawa berakhir dan kekuasaan penuh berada di tangan kaisar (Sihombing,1997:51).

2.2 Latar Belakang Restorasi Meiji

Pada tahun 1853, komodor Matthew C. Perry dari Amerika Serikat memasuki teluk Tokyo dengan kekuatan satu kuadron, sebanyak empat kapal. Ia kembali tahun berikutnya dan berhasil membujuk Jepang untuk membuat perjanjian persahabatan dengan negaranya. Pada tahun yang sama menyusul

perjanjian-perjanjian serupa dengan Rusia, Inggris dan Belanda, sehingga Jepang kembali terbuka bagi dunia luar.

Perjanjian-perjanjian tersebut diubah empat tahun kemudian menjadi perjanjian perdagangan, dan kemudian perjanjian yang serupa dibuat dengan Perancis.

Kejadian-kejadian tersebut berdampak meningkatkan tekanan arus sosial dan politik yang menggerogoti fondasi struktur feodal. Selama kira-kira satu dasawarsa terjadi kekacauan besar, sampai sistem feodal keshogunan Tokugawa runtuh pada tahun 1867 dan kedaulatan dikembalikan sepenuhnya kepada kaisar dalam Restorasi Meiji pada tahun 1868.

Runtuhnya pemerintahan Tokugawa merupakan berakhirnya zaman Edo yang ditandai dengan penyerahan kekuasaan Shogun Keiki kepada kaisar Meiji. Zaman baru ini disebut zaman Meiji yang berlangsung antara 1868-1912. Kaisar Meiji juga dipanggil sebagai kaisar Mutsuhito. Sebagai pusat pemerintahan maka kota Edo diganti namanya dengan Kyoto, dan pada tahun 1869 ibu kota dipindahkan dari Kyoto ke Tokyo (Suradjaja,1984:21).

Pada masa inilah Jepang bergerak memodernisasikan diri dalam segala bidang, yang dikenal dengan **Restorasi Meiji**, dimana Jepang membangun sistem pemerintahan, ekonomi bahkan budaya dengan mencontoh negara-negara Barat.

Masa Meiji (1868-1912) merupakan salah satu periode yang paling istimewa dalam sejarah bangsa-bangsa. Di bawah pimpinan Kaisar Meiji, Jepang bergerak maju sehingga hanya dalam beberapa dasawarsa mencapai apa yang diinginkan dimana di Barat memerlukan waktu berabad-abad lamanya. Hal yang dicapai tersebut adalah pembentukan suatu bangsa yang modern yang memiliki

perindustrian modern, lembaga-lembaga politik modern, dan pola masyarakat yang modern. Golongan-golongan lama yang selama masa feodal membuat masyarakat terbagi dihapuskan. Seluruh negeri terjun dengan semangat dan antusiasme ke dalam studi dan pengambilalihan peradaban Barat modern.

Perekonomian pada masa Tokugawa masih sangat terbatas dan hanya bersifat perdagangan antar daerah melalui laut pedalaman dan hanya berkisar pada beras dan tekstil. Ini dipengaruhi oleh sikap samurai yang memandang rendah kepada perdagangan dan segala hal yang bersangkutan dengan uang. Selain itu, pemerintah Tokugawa juga melarang untuk mengadakan hubungan dengan luar negeri.

Maka setelah Restorasi Meiji, perekonomian Jepang memperoleh kesempatan yang baik untuk mulai berkembang dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan. Pembaharuan yang paling utama adalah penghapusan sistem feodal yang diterapkan oleh Tokugawa, sehingga terbukalah peluang untuk rakyat Jepang terhadap pendidikan yang meniru sistem pendidikan dunia Barat, selain dengan menerapkan sistem moneter, sistem pajak yang memungkinkan berkembangnya kapitalis atau kaum pemodal. Selain itu, pemerintah Meiji juga mendatangkan tenaga-tenaga ahli dan mengimpor mesin-mesin pabrik untuk ditiru, sehingga Jepang mampu membangun dan memodernisasikan industrinya.

2.3 Gokajo no Goseimon

Tokugawa Yoshinobu, Shogun Tokugawa yang ke-15, menyampaikan pengunduran dirinya kepada kaisar pada bulan November 1867, mengakhiri

kekuasaannya yang kurang lebih dua abad lamanya. Pada tanggal 3 Januari 1868 dikeluarkanlah sebuah pernyataan resmi tentang restorasi dan kemudian dibentuk suatu pemerintahan yang sesuai dengan pola kuno dimana kaisar menangani masalah-masalah politik. Pada tanggal 3 Januari itu pulalah para pendukung restorasi mengambil keputusan-keputusan penting tentang peranan keluarga Tokugawa dalam rezim yang baru.

Pada tanggal 6 April 1868 kaisar mengeluarkan Sumpah Jabatan (*Gokajo no Goseimon*) yang sangat penting yang terdiri dari lima pasal, yang menggambarkan garis besar asas-asas yang harus dianut oleh pemerintahnya. Isi dari piagam tersebut yakni :

1. Dewan-dewan musyawarah akan dibentuk secara luas dan tiap-tiap kebijaksanaan akan ditetapkan berdasarkan musyawarah ;
2. golongan tinggi dan rendah harus bersatu dalam melaksanakan rencana-rencana bangsa dengan penuh gairah ;
3. Semua warga sipil dan pejabat militer dan rakyat diijinkan untuk memenuhi cita-cita mereka, dengan demikian tidak ada ketidak puasan antara mereka.
4. adat istiadat masa lalu yang tidak baik harus dihapus, dan asas-asas yang adil dan wajar haruslah menjadi dasar kebijaksanaan kita ;
5. Pengetahuan harus dicari keseluruh dunia dan dengan demikian kesejahteraan kerajaan dapat ditingkatkan.

Meskipun pasal yang pertama tidak dimaksudkan sebagai suatu pernyataan tentang demokrasi modern, sumpah jabatan itu, bagaimanapun adalah sangat progresif untuk masa itu. Sumpah itu menguatkan asas politik yang baru berupa

mendengarkan pendapat umum dan membuka negeri bagi hubungan persahabatan dengan semua negeri di dunia.

Pemerintah kerajaan segera mengumumkan satu rangkaian pemusatan otoritas politis di dalam negara kesatuan, industrialisasi ekonomi, undang-undang pokok kaisar, wajib militer yang universal, dan penciptaan suatu sistem pendidikan di seluruh negara. Dengan demikian di masa datang tidak ada masyarakat yang buta huruf.

Perubahan-perubahan dalam pemerintahan ini disusul dengan langkah-langkah yang meninggalkan tradisi lama. Pemerintah baru mencatat kenyataan bahwa Edo merupakan pusat politik bangsa, dan dalam bulan November 1868 pemerintah secara resmi memberinya nama baru Tokyo (ibukota sebelah timur). Dalam bulan November kaisar hijrah dari Kyoto ke ibukota baru itu dalam suatu pawai kebesaran, dan menetapkan kediaman resmi tetapnya disana pada awal tahun 1869. .

Pada umumnya rezim baru itu menekankan pentingnya kaisar memerintah bangsa. Maka setelah wafatnya kaisar Komei pada tahun 1866, anak laki-laknya yang baru berumur empat belas tahun yaitu Mutsuhito menggantikannya. Semua pengumuman resmi pemerintah baru dibuat atas namanya. Pada bulan Oktober 1868 Kaisar mengumumkan bahwa masa tahun-tahun pemerintahannya adalah ”*Meiji*” (pemerintahan yang cerah). Dengan demikian maka restorasi kerajaan tahun 1867 – 1868 dikenal dengan nama Restorasi Meiji, dan tahun-tahun antara 1868 – 1912 disebut era Meiji, karena Mutsuhito wafat tahun 1912.

2.4 Haihan Chiken

Pemerintahan baru Meiji dengan cepat menyatakan persetujuan bahwa Jepang harus dimodernkan mengikuti garis-garis yang ditempuh negara-negara maju di Barat, dan lebih jauh lagi mereka percaya bahwa prasyarat yang penting sekali menuju modernisasi adalah penggantian sistem desentralisasi pemerintahan daimyo dengan sistem pemerintahan daerah terpusat.

Langkah-langkah pertama pemerintah menuju desentralisasi segera diambil setelah runtuhnya perlawanan militer terhadap restorasi itu. Tanah-tanah bakufu yang kalah dan daimyo yang menentang haluan kekaisaran disita dan diatur kembali sebagai satuan-satuan administratif atau propinsi-propinsi (*fu* dan *ken*) di bawah pemerintah pusat. Tindakan-tindakan ini tidak dikenakan terhadap para daimyo yang netral dan mereka yang telah mendukung restorasi. Jadi sistem feodal harus terus berlangsung di bawah kepemimpinan kekaisaran sedangkan *han*, *fu* dan *ken* berperan sebagai satuan-satuan dasar pemerintah setempat. Pemerintah baru, yang sebagian besar terdiri dari wakil-wakil Satsuma, Choshu, Tosa, dan Hizen berusaha meningkatkan sentralisasi lebih lanjut dengan membujuk para daimyo keempat *han* ini untuk mengembalikan kepada pemerintah kekaisaran wewenang politik atas tanah dan penduduk mereka. Pada bulan Maret 1869 keempat daimyo itu secara bersama-sama mohon kepada tahta kerajaan untuk menerima pengembalian tanah dan penduduknya yang merupakan *fief* (*hanseki hokan*), dan para daimyo lain segera mengikuti teladan mereka. Istana mengabulkan permohonan mereka dalam bulan Juli, dan memerintahkan daimyo lain yang belum menawarkan demikian agar menyerahkan *fief* mereka.

Segera setelah semua daimyo tunduk kepada kebijaksanaan ini, pemerintah kemudian menunjuk mereka menjadi gubernur di *han* masing-masing. Bagaimanapun juga, kebijaksanaan ini melibatkan jauh lebih banyak hal daripada sekedar suatu perubahan tata nama, daimyo yang sebelumnya sudah menjadi penguasa-penguasa setempat yang semiotonom di wilayah-wilayah kekuasaan mereka, kini menjadi pejabat-pejabat pemerintah pusat yang mengabdikan dengan persetujuan kaisar.

Program *hanseki hokan* mengakhiri eksistensi struktur politik feodal dalam bentuknya, tetapi berpengaruh sedikit saja pada kehidupan politik di dalam tiap-tiap *han*. Maka untuk memadukan daerah-daerah setempat secara lebih menyeluruh ke dalam struktur administrasi pusat, pemerintah berupaya untuk menghapus sama sekali *han* dan mendirikan propinsi-propinsi (*ken*) sebagai gantinya. Karena diperkirakan akan ada perlawanan senjata, pemerintah membentuk pasukan pengawal kekaisaran yang terdiri dari pasukan-pasukan dari Satsuma, Choshu, dan Tosa sebelum melanjutkan rencana-rencananya. Akan tetapi, banyak gubernur eks-daimyo yang tidak mau memikul tanggung jawab keuangan guna memerintah wilayah-wilayah kekuasaan mereka dan secara aktif mendorong pemerintah agar menghapus *han* mereka. Sebagai akibatnya maka pemerintah dapat menghapuskan *han* dan membentuk propinsi-propinsi (*Haihan chiken*) pada bulan Agustus 1871 tanpa menghadapi tantangan militer terhadap perintah-perintahnya. Dihapuskannya sistem *han* dan ditetapkan sistem daerah administrasi (*Haihan Chiken*) sebagai suatu tindakan untuk menggantikan sistem Han yang tradisional dan memperkenalkan pemerintah lokal yang baru.

Dalam percobaan untuk menghapuskan feodalisme di Jepang, pemerintahan Meiji yang baru yang menggantikan shogun Tokugawa menghapuskan ratusan feodal klan atau han.

Para gubernur bekas daimyo itu semuanya ditempatkan di Tokyo dan digantikan oleh gubernur-gubernur baru (*fu-chiji* dan *ken-rei*, atau kemudian *ken-chiji*) dan banyak di antara mereka berasal dari Satsuma dan Choshu. Pada waktu yang sama, jumlah satuan-satuan administratif digabungkan secara besar-besaran, yaitu dari lebih 260 *han* menjadi 72 *ken* dan 3 *fu* (satuan-satuan propinsi yang penting ialah Tokyo, Osaka, dan Kyoto). Penggabungan lebih lanjut terjadi pada tahun 1889 ketika jumlah *ken* diperkecil menjadi hanya empat puluh tiga.